

**KERAGAAN KELEMBAGAAN KOPERASI :
KAJIAN PADA KOPERASI DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2009**

Mardiana, dan Eriyati

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Kampus Binawidya Panam
Jalan H.R. Soebrantas Km 12,5 Pekanbaru

ABSTRAKSI

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi keragaan kelembagaan koperasi di Kabupaten Pelalawan Tahun 2009. Jumlah sampel koperasi sebagai sumber data sebanyak 17 unit koperasi, yang diambil dengan metode *cluster random sampling*. Pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan. Anggota dan pengurus sangat memahami AD/ART koperasi beserta dengan panduan operasionalnya. Struktur koperasi telah lengkap sesuai dengan kebutuhan di masing-masing koperasi dengan bentuk hubungan yang jelas. RAT sebagai pengambilan keputusan tertinggi menghasilkan rencana strategis yang akan dijalankan oleh pengurus. SOP dirancang dengan melibatkan seluruh perangkat koperasi dengan mempertimbangkan masukan dari stakeholders dan diterapkan secara fleksibel.

Kata Kunci: Keragaan, kelembagaan, struktur, dan koperasi.

PENDAHULUAN

Salah satu strategi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan yang kemudian mulai dilirik oleh pemerintah adalah dengan menggulirkan kebijakan yang pro terhadap masyarakat bawah atau masyarakat miskin. Salah jenis kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk itu adalah kebijakan pembangunan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Koperasi adalah salah satu sokoguru perekonomian Indonesia yang terus-menerus harus diberdayakan agar kinerjanya semakin baik, sehingga mampu memberikan manfaat bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Peranan yang harus dimainkan oleh koperasi di masa mendatang adalah bidang produksi dan pemasaran komoditi agribisnis dan sektor-sektor lain, sehingga peranan koperasi dalam kehidupan ekonomi Indonesia benar-benar dapat menjadi tulang punggung perekonomian (Antara dan Komenaung, 2007).

Beberapa hasil studi menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan koperasi mengalami kesulitan dalam pengembangan diri, seperti masalah sumber daya manusia yang terbatas, minimnya dukungan dana atau permodalan, strategi pengembangan organisasi yang tidak terencana serta berbagai faktor internal lainnya, disisi lain faktor eksternal juga menjadi salah satu masalah yang membuat koperasi sulit mengembangkan diri, seperti keberpihakan sistim ekonomi yang dianut dan dijalankan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pelalawan, yang meliputi 12 kecamatan. Objek penelitian ini adalah koperasi yang ada di Kabupaten Pelalawan, baik koperasi primer maupun koperasi

sekunder. Koperasi di Kabupaten Pelalawan sampai tahun 2008 berjumlah 181 unit (Data Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan Pasar) yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah sampel Koperasi sebagai sumber data sebanyak 17 unit koperasi, yang diambil dengan metode acak kelompok (*cluster random sampling*).

Pengumpulan data menggunakan beberapa metode antara lain: (i) wawancara terstruktur, yaitu mewawancarai manajer koperasi dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur (quesioner) yang khusus dirancang untuk merekam berbagai jenis data primer seperti disebutkan sebelumnya; (ii) Metode wawancara mendalam, yaitu mewawancarai manajer Koperasi menggunakan panduan wawancara (*interview guide*); (iii) Metode observasi, yakni melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi internal dan eksternal koperasi serta masalah-masalah yang dihadapi oleh koperasi; (iv) Metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang dimiliki sumber data sekunder atau instansi pemerintah terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan koperasi di Kabupaten Pelalawan dewasa ini secara kuantitatif cukup menggembirakan, hal ini tercermin dengan semakin banyaknya tumbuh lembaga koperasi dengan berbagai jenis usahanya, yang didukung oleh anggota dari berbagai kalangan. Perkembangan koperasi dengan anggota dari berbagai kalangan tentu membutuhkan adanya perhatian untuk pengembangannya, mengingat tantangan yang dihadapi dewasa ini berkaitan dengan bangun usaha koperasi adalah membangun citra positif tentang koperasi.

Kelembagaan koperasi di Kabupaten Pelalawan periode 2007–2008 mengalami perkembangan secara signifikan dengan laju perkembangan sebanyak 7 unit atau 4,02 persen dari 174 unit pada tahun 2007 menjadi 181 unit pada tahun 2008 yang berarti dibawah rata-rata pertumbuhan koperasi secara nasional yakni 5,99 atau juga lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan koperasi di Riau pada tahun yang sama (2007-2008) yang mencapai angka 95 atau 2,37%. Dari sejumlah koperasi di Riau, jenis koperasi yang terbesar jumlahnya adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yakni sebanyak 38 unit, kemudian diikuti oleh Koperasi Pertanian (Koptan) sebanyak 16 Unit, Koperasi Paegawai Negeri (KPRI) sebanyak 11 unit, Koperasi Perkebunan sebanyak sebanyak 10 unit, Koperasi Karyawan (Kopkar) sebanyak 9 Unit, Koperasi Serba Usaha 7 unit dan masing-masing 5 unit Koperasi Pesantren dan Koperasi Wanita (Kopwan), jenis koperasi lainnya berjumlah kurang dari 5 unit.

Dari sejumlah 174 koperasi di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2007, sejumlah 134 termasuk koperasi aktif dan sisanya 40 koperasi termasuk tidak aktif . Sementara jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2008 meningkat menjadi 141 unit dan yang tidak aktif tetap 40 unit. Koperasi aktif yang terbanyak adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yakni sebanyak 29 unit, kemudian diikuti oleh Koperasi Karyawan (Kopkar) sebanyak 9 unit, KPRI sebanyak 8 unit, Koperasi Pertanian (Koptan) dan Koperasi Perkebunan (Kopbun) masing-masing sebanyak 6 unit. Yang kurang menggembirakan adalah adanya data yang menunjukkan adanya koperasi yang tidak aktif yang melebihi jumlahnya yang aktif seperti Koperasi Pertanian (Koptan) yakni sebanyak 10 unit, jenis lainnya, yang tidak aktif masih lebih rendah dibandingkan jumlah yang aktif, seperti KUD sebanyak 9 unit, Kopbun 4 unit, KPRI dan KSU masing-masing 3 unit.

Perkembangan jumlah anggota koperasi di Kabupaten Pelalawan periode 2007-2008 mengalami peningkatan sebanyak 345 orang atau 0,98 persen dari 34.889 orang pada tahun 2007 menjadi 35.234 orang pada tahun 2008. Koperasi dengan jumlah anggota terbesar adalah: Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 17.963 orang, Koperasi Karyawan (Kopkar) sebanyak 5.443 orang, Koperasi Pertanian (Koptan) 3.350 orang, Koperasi Perkebunan (Kopbun) sebanyak 2.254 orang, dan KPRI sebanyak 706

orang.

Pertumbuhan jumlah anggota koperasi di Kabupaten Pelalawan sebesar 345 orang dipicu oleh penambahan luas perkebunan dan jumlah petani serta penambahan jumlah karyawan seiring dengan pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Pelalawan selama kurun waktu 2007-2008. Berdasarkan jenis koperasinya, lima besar jumlah anggota koperasi terbanyak adalah koperasi unit desa (KUD) yang jumlah anggotanya mencapai 17.963 orang, diikuti anggota koperasi karyawan (Kopkar) sebanyak 5.443 orang, Koperasi Pertanian sebanyak 3.350 orang, koperasi perkebunan (Kopbun) sebanyak 2.254 orang dan terkecil jumlah anggotanya adalah koperasi pegawai negeri (KPRI) sebanyak 706 orang.

Dengan melihat perkembangan kelembagaan yang ada, terlihat bahwa animo masyarakat terhadap keberadaan koperasi mulai meningkat terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Indikator peningkatan animo masyarakat terhadap keberadaan koperasi juga dibarengi dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam berkoperasi, hal ini dapat terlihat juga pada pelaksanaan RAT, dimana pada periode 2007– 2008 pelaksanaan RAT mengalami peningkatan sebanyak 3 unit koperasi atau 5,08 persen; dari 59 unit pada tahun 2007 menjadi 62 unit pada tahun 2008. Koperasi Unit Desa (KUD) memberikan kontribusi terbesar dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi aktif, yaitu mencapai 21 pada tahun 2007. Sedangkan koperasi lainnya umumnya dibawa 5 unit.

Legalitas badan usaha adalah keseluruhan syarat formal yang wajib dimiliki oleh koperasi sebagai badan hukum, seperti akte notaris, NPWP, surat izin usaha perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Disamping kelengkapan dokumen tersebut, koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan fungsi-fungsinya wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sebagai pedoman bagi anggota, pengurus dan pengelola dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen lembaga.

Dari kajian di lapangan menunjukkan bahwa umumnya koperasi yang dijadikan sampel telah memiliki legalitas sebagai badan usaha koperasi, seperti akte notaris, NPWP, SIUP, SITU an TDP, namun demikian berdasarkan tanggapan dari pengurus dan anggota koperasi, 64% menyatakan kelengkapan administrasi pendirian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya 7% yang menyatakan kelengkapan tersebut kurang lengkap. Dalam hal keberadaan AD/ART, 61% responden (pengurus dan anggota) mengatakan bahwa AD/ART tersebut telah cukup lengkap dan dapat difahami oleh perangkat koperasi, hanya 7% yang menyatakan AD/ART tersebut tidak cukup jelas dan sulit difahami. Hal ini sesuai dengan Kep.Men. 129/Kep/M/KUKMI/XI/2002 berkenaan dengan kesehatan kelembagaan koperasi (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2004)

Sebagai panduan operasional kelembagaan koperasi, 57% responden menyatakan AD/ART tersebut telah dijadikan acuan operasional koperasi dan sangat baik pelaksanaannya, 11% menyatakan telah baik pelaksanaannya, 25% menyatakan cukup dan hanya 7% yang menyatakan AD/ART sangat tidak baik pelaksanaannya (tidak dijadikan pedoman).

Tabel 1. Legalistas Badan Usaha

No	Uraian	Nilai	Tanggapan				Jumlah
			1	2	3	4	
1.	AD/ART tertulis dengan jelas dan dapat	∑ Resp	17	4	5	2	28

	dipahami oleh semua perangkat koperasi	%	61	14	18	7	100
2	AD/ART menjadi panduan operasional lembaga	Σ Resp	16	3	7	2	28
		%	57	11	25	7	100
3	Kelengkapan administrasi pendirian sesuai dengan peraturan yang berlaku (Akte Notaris, NPWP, SIUP, SITU, TDP, dsb)	Σ Resp	18	5	3	2	28
		%	64	18	11	7	100

Sumber : Hasil Survey, 2009.

Struktur koperasi dibangun sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai koperasi, struktur koperasi menunjukkan bagian-bagian dalam organisasi koperasi yang berfungsi menyelenggarakan tugas-tugas tertentu, serta hubungan bagian satu dengan bagian yang lainnya. Terkait dengan struktur organisasi koperasi di Kabupaten Pelalawan, data sampel koperasi menunjukkan bahwa 79% responden menyatakan struktur tersebut sudah sangat baik (lengkap dan jelas), 21% menyatakan baik.

Hasil di atas sejalan dengan tanggapan responden tentang pemahaman tugas dan fungsi dari masing-masingnya dari seluruh perangkat, 61% menyatakan perangkat koperasi telah sangat baik memahaminya, 32% responden menyatakan fungsi dan tugas perangkat telah baik difahami dan 7% yang menyatakan bahwa perangkat telah cukup memahami fungsi dan tugas perangkat koperasi sebagaimana struktur. Hasil ini mengindikasikan bahwa umumnya responden menganggap bahwa struktur dan fungsi organisasi koperasi telah difahami dengan baik oleh perangkat koperasi (pengurus, pengawas dan pengelola).

Sumarsono (2003) menyebutkan kehadiran sebuah lembaga yang secara khusus bertugas mengawasi pengurus, memungkinkan dilakukannya pengawasan secara lebih sistematis dan terlembaga terhadap berbagai aspek kegiatan pengurus. Dengan ditingkatkannya pengawasan terhadap berbagai aspek kegiatan pengurus, maka peluang terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diharapkan akan dapat dikurangi. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi.

Struktur organisasi yang baik adalah struktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan organisasi, hasil kajian menunjukkan bahwa 43% responden menyatakan struktur koperasi telah sangat sesuai dengan kebutuhan, 50% responden menyatakan struktur tersebut sudah baik dan hanya 7% yang menyatakan cukup sesuai dengan kebutuhan. Artinya umumnya responden memberikan tanggapan positif terhadap keberadaan struktur organisasi koperasi yang diyakini telah sesuai dengan kebutuhan organisasi koperasi.

Sitio dan Tamba (2001) menyatakan badan usaha koperasi di Indonesia memiliki struktur kelembagaan koperasi yang dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu: RAT, pengurus, pengawas, dan pengelola. Apakah struktur organisasi koperasi dapat merespons dinamika internal dan eksternal serta tanggap terhadap perubahan-perubahan? Untuk kasus Kabupaten Pelalawan, hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa umumnya tanggapan responden sangat positif terhadap hal tersebut, 32% responden menyatakan bahwa struktur organisasi sangat dinamis dan tanggap perubahan-perubahan, 57% dinamis dan tanggap dan hanya 11% yang menyatakan struktur tersebut cukup dinamis dan tanggap terhadap perubahan-perubahan. Terhadap hubungan antar pengurus, pengelola dan pengawas dalam organisasi, umumnya responden menilai positif, 57% menilai sangat baik hubungan tersebut terjalin, 39% menilai baik dan hanya 4% yang menilai cukup baik. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam komunikasi internal organisasi koperasi, hubungan yang terjalin secara baik memungkinkan perangkat bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi koperasi.

Dalam rangka perwujudan asas demokrasi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi maka diadakan rapat

anggota paling sedikit satu kali dalam satu tahun dalam rapat anggota tahunan koperasi, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan koperasi tahun lalu serta penyampaian program kerja dan RAPBK tahun berjalan atau tahun berikutnya. Selain sebagai sarana pertanggungjawaban kepengelolaan koperasi oleh pengurus serta media melalui mana anggota melibatkan diri dalam proses perencanaan koperasi, rapat anggota tahunan juga menjadi salah satu cermin sehatnya manajemen organisasi koperasi. Bagaimana pelaksanaan RAT koperasi di kabupaten Pelalawan? Data temuan lapangan menunjukkan bahwa 100% responden menyatakan koperasi mereka telah mengadakan rapat anggota tahunan (RAT), terhadap pelaksanaan RAT tersebut terdapat variasi tanggapan dari responden, 82% menyatakan pelaksanaan RAT sangat baik, 14% menyatakan baik dan 4% yang menyatakan cukup baik, artinya terdapat kepuasan dari responden terhadap pelaksanaan RAT pada koperasi mereka.

Tabel 2. Struktur Koperasi

No	Uraian	Nilai	Tanggapan			Jumlah
			1	2	3	
1	Struktur koperasi disusun dengan lengkap dan jelas (Pengurus, Pengawas dan Pengelola)	\sum Resp	22	6	-	28
		%	79	21	-	100
2	Seluruh perangkat koperasi memahami fungsi dan tugas masing-masing	\sum Resp	17	9	2	28
		%	61	32	7	100
3	Struktur koperasi memadai dan sesuai kebutuhan	\sum Resp	12	14	2	28
		%	43	50	7	100
4	Struktur koperasi dinamis dan tanggap terhadap perubahan	\sum Resp	9	16	3	28
		%	32	57	11	100
5	Hubungan antar pengurus, pengelola dan pengawas dalam struktur koperasi	\sum Resp	16	11	1	28
		%	57	39	4	100

Sumber: Hasil Survey, 2009.

Walaupun UU. No.25 tahun 1992 menyatakan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, namun dalam prakteknya sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan dari pengurus koperasi yang bersangkutan, dalam setiap rapat anggota, masing-masing anggota memiliki hak yang sama menyampaikan pendapat, usulan, pernyataan ataupun pertanyaan, rapat anggota adalah pemegang kuasa tertinggi di dalam organisasi koperasi. Bagaimana kenyataannya di Kabupaten Pelalawan? Adakah gaya kepemimpinan yang demokratis dengan pengambilan keputusan yang partisipatif dan demokratis? Hasil kajian lapangan menunjukkan tanggapan responden yang bervariasi dalam menanggapi gaya kepemimpinan yang demokratis oleh pengurus pada koperasi mereka, 64% menyatakan sangat baik (partisipatif dan demokratis), 25% menyatakan demokratis dan partisipatif (baik) dan 11% menyatakan cukup partisipatif dan demokratis. Keadaan ini menunjukkan bahwa prinsip demokratis dalam pengelolaan koperasi telah dijalankan secara baik.

Di samping rapat anggota tahunan (RAT), manajemen koperasi yang baik adalah manajemen yang memiliki perencanaan pengembangan organisasi koperasi (renstra) jangka panjang dan jangka pendek yang mudah difahami oleh pengurus, pengelola dan anggota, terhadap hal tersebut, umumnya responden menyatakan bahwa koperasi mereka telah memiliki rencana strategis, 50% responden menyatakan rencana strategis tersebut sangat mudah difahami, 29% responden menyatakan renstra tersebut mudah difahami dan 21% respon menyatakan renstra tersebut cukup.

Tabel 3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Koperasi

No	Uraian	Nilai	Tanggapan				Jumlah
			1	2	3	4	
1	Pelaksanaan RAT	\sum Resp	23	4	1	-	28

		%	82	14	4	-	100
2	Gaya kepemimpinan yang demokratis	\sum Resp	18	7	3	-	28
		%	64	25	11	-	100
3	Pengambilan keputusan manajemen dilakukan secara Partisipatif dan Demokratis	\sum Resp	18	7	3	-	28
		%	64	25	11	-	100
4	Memiliki rencana pengembangan untuk jangka panjang (Renstra) dan pendek & mudah dipahami	\sum Resp	14	8	6	-	28
		%	50	29	21	-	100
5	Stakholder memberikan masukan dalam penyusunan rencana strategis	\sum Resp	11	11	5	1	28
		%	39	39	18	4	100
6	Rencana Kegiatan Tahunan (Detail Implementation Plan) merefeksikan Rencana Strategis	\sum Resp	12	9	5	2	28
		%	43	32	18	7	100
7	Rencana strategis disusun berdasarkan alokasi sumber daya yang tersedia	\sum Resp	12	9	5	2	28
		%	43	32	18	7	100
8	Rencana strategis sebagai dasar dalam melakukan movev	\sum Resp	13	7	6	2	28
		%	46	25	22	7	100

Sumber: Hasil Survey, 2009.

Terhadap rencana strategis yang dimiliki oleh koperasi, ternyata tidak semua responden berpendapat sama kalau penyusunan renstra tersebut mengikutsertakan stakeholders, masing-masing 39% responden menyatakan sangat baik dan baik dalam merespons keikutsertaan stakeholder, 18% responden menyatakan bahwa dalam penyusunan renstra tersebut cukup akomodatif menyertakan stakeholders dan 4% responden menyatakan kurang menyertakan stakeholders dalam penyusunan renstra. Kajian ini sesuai dengan temuan Yunasaf *et. al* (2000) tentang dinamika organisasi koperasi.

Apakah Rencana Kegiatan tahunan (RKT) telah mencerminkan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra)? 43% responden menyatakan RKT tersebut telah sangat baik mencerminkan pelaksanaan Renstra, 32% responden menilai RKT tersebut telah baik karena telah menjalankan Renstra, 18% menilai cukup baik dan 7% menilai RKT buruk karena tidak mencerminkan Renstra, penilaian tersebut didasari oleh kegagalan pengurus pada salah satu koperasi dalam menerjemahkan salah satu sasaran renstra yakni pengembangan keragaman jenis usaha koperasi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa masing-masing 32% responden menyatakan koperasi mereka memiliki dan menjalankan secara sangat baik dan baik SOP tersebut, 25% responden menyatakan koperasi mereka memiliki dan melaksanakan secara cukup baik SOP dan terdapat masing-masing 7% dan 4% responden yang menyatakan koperasi mereka tidak baik dan sangat tidak baik melaksanakan SOP. Diantara koperasi yang kurang baik melaksanakan SOP karena seringnya berubah-ubah standar operasional tersebut serta kurangnya komitmen dari pengurus menegakkan aturan yang sudah mereka sepakati, contoh yang diberikan oleh responden adalah kegagalan anggota mengembalikan pinjaman sesuai jadwal (pada koperasi simpan pinjam) serta sebagian pengurus juga dianggap gagal mengembalikan dana pinjaman dari pihak ketiga (pemerintah atau swasta).

Tabel 4 Prosedur Administrasi

No	Uraian	Nilai	Tanggapan					Jumlah
			1	2	3	4	5	
1	Koperasi memiliki SOP (standar operasional dan prosedur)	\sum Resp	9	9	7	2	1	28
		%	32	32	25	7	4	100
2	SOP disusun melibatkan seluruh perangkat koperasi	\sum Resp	11	7	8	1	1	28
		%	39	25	28	4	4	100
3	SOP secara berkala dilakukan pembaharuan (update)	\sum Resp	10	10	6	1	1	28
		%	36	36	20	4	4	100

4	SOP mempertimbangkan masukan dari stakeholders	Σ Resp	9	9	8	1	1	28
		%	32	32	28	4	4	100
5	SOP dirancang dan diterapkan secara fleksibel	Σ Resp	11	7	8	1	1	28
		%	39	25	28	4	4	100

Sumber: Hasil Survey, 2009

Dalam hal penyusunan SOP, umumnya responden menyatakan koperasi mereka melibatkan perangkat koperasi, masing-masing 39% menyatakan sangat tinggi tingkat keterlibatan perangkat, 25% persen menyatakan tinggi (baik) keterlibatan perangkat koperasi dan 28% menyatakan keterlibatan perangkat cukup tinggi dan masing-masing 4% responden menyatakan koperasi mereka rendah dan tidak menyertakan perangkat koperasi dalam penyusunan SOP.

Administrasi dan prosedur pelayanan merupakan faktor yang cukup tinggi di dalam menentukan keberhasilan suatu koperasi (Ketaren, 2006). Karenanya diperlukan adanya SOP yang disusun melalui penglibatan berbagai unsur stakeholher. Sekitar 32% responden menyatakan bahwa koperasi mereka mempertimbangkan masukan stakeholders dan masing-masing sebanyak 4% responden menyatakan koperasi mereka tidak dan sangat tidak mempertimbangkan masukan stakeholders. Data lapangan juga menunjukkan bahwa dalam hal perancangan dan penerapan SOP, umumnya responden berpendapat bahwa koperasi mereka menerapkan secara fleksibel, masing-masing 35% dan 25% responden menyatakan sangat (baik) fleksibel dan fleksibel melaksanakan SOP, 28% responden menyatakan cukup baik dan masing-masing 4% yang menyatakan tidak fleksibel dan sangat tidak fleksibel menerapkan SOP pada koperasi mereka.

KESIMPULAN

Hasil kajian terhadap keragaan kelembagaan koperasi di Kabupaten Pelalawan di peroleh kesimpulan bahwa anggota dan pengurus sangat memahami AD/ART koperasi beserta dengan panduan operasionalnya. Struktur koperasi telah lengkap sesuai dengan kebutuhan di masing-masing koperasi dengan bentuk hubungan yang jelas. RAT sebagai pengambilan keputusan tertinggi menghasilkan rencana strategis yang akan dijalankan oleh pengurus. SOP dirancang dengan melibatkan seluruh perangkat koperasidengan mempertimbangkan masukan dari stakeholders dan diterapkan secara fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, M., dan A.G. Komenaung, 2007. Kinerja Koperasi Unit Desa Di Provinsi Bali: Pendekatan Structural Equation Model. *SOCA (Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness)* 7 (3) November.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 2004. *Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*. Jakarta: Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM.
- Ketaren, N., 2006. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi Credit Union Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Tesis Magister. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sitio, A. dan H. Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Sumarsono, S., 2003. *Manajemen Koperasi. Teori dan Praktek*. Graha Ilmu, Jakarta.
- Yunasaf, U., N. Setiawan, dan L. Nurlina. 2000. *Hubungan Dinamika Organisasi Koperasi dengan Partisipasi Anggota Koperasi: Suatu Kasus pada Koperasi Persusuan*. Laporan Penelitian, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Bandung.